

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Ali, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Kencana.
- Aristotle. (2016). *Nicomachean Ethics (Translated by W. D. Ross with an Introduction by R. W. Browne)*. Digireads.com Publishing.
- Asikin, Z. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Rajawali Pers.
- Fadjar, M. (2013). *Teori-teori Hukum Kontemporer*. Setara Press.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah Kanisius*.
- Masyhur, K. (1985). *Membina Moral dan Akhlak*. Kalam Mulia.
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (2nd ed.). Liberty.
- Nasution, A. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Diadit Media.
- Nasution, A. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Diadit Media.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Laksbang Pressindo.
- Rawls, J. (2011). *A Theory of Justice, Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Pustaka Belajar.
- Rhiti, H. (2015). *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik Sampai Postmodernisme* (5th ed.). Universitas Atma Jaya.
- Safaat, R. (2009). *Lapisan-lapisan Dalam Studi Hukum*. Bayumedia Publishing.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (1st ed.). Kencana.
- Sidharta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soedikno, M. (2006). *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sinar Grafika.

- Sutedi, A. (2008). *Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Ghalia Indonesia.
- Syahrani, R. (1992). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Wahyono, P. (1992). *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*. Rajawali Pers.

JURNAL/MAKALAH

- Effendi, Z., Gaol, S. L., & Darwis, N. (2023). Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 12(2).
<https://doi.org/0.19109/intelektualita.v12i2.18848>
- Fathor, F., & Widiarto, A. E. (2024). Memikirkan Kembali 'Res Judicata Pro Varitate Habetur dalam Peradilan Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ijler.v19i1.995>
- Furqon, E. (2020). Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 77–85. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8523>
- Ganesha, F., Busroh, F. F., Khairo, F., Utomo, M., & Fikri, H. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan BPSK Kota Lubuklinggau Nomor: 002 P.Arbitrase/BPSK-LLG/IV/2021). *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 91–102.
- Haryani, A. T., Sarjiyati, Purwati, Y., & Pudjiono, M. J. (2020). Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen. *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(2).
<http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>
- Kristiyanto, D. (2018). Menggugat Sifat Final dan Mengikat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). *Jurnal Ilmu Hukum Alethea*, 1(2), 128–141.



- Marbun, N., & Pahlefi, P. (2021). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Jambi. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 2, 96–110.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22437/zaaken.v2i1.11897>
- Nisantika, R., & Santika Maharani, N. L. P. E. (2021). Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK). *Jurnal Locus Delicti*, 2(1).
<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JLD>
- Perdana, R. P., Fuad, & Munawar, S. (2021). Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta. *Widya Pranata Hukum*, 3(2).
- Prayitno, I. H., Jakarsih, P. I., & Pahlawan M. P., H. M. R. (2021). Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Hak-Hak Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *PAMULANG Law Review*, 4(1), 43–56.
<https://core.ac.uk/download/pdf/478601203.pdf>
- Prayuti, Y. (2023). Urgensi Pembaruan Hukum Perlindungan Konsumen dengan Pembentukan Pengadilan Khusus sebagai Upaya Pemenuhan Akses terhadap Keadilan bagi Konsumen. *Unes Law Review*, 6(1).
<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.433>
- Rimanda, R. (2019). Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Quasi Yudisial Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 17–34.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.2>
- Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal RechtsVinding*, 7(1).
- Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia. *Jurnal*

- Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.79>
- Tauhiddah, T., Azheri, B., & Mannas, Y. A. (2020). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 94–105.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3472>
- Weenas, R. M. (2019). Legalitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Upaya Perlindungan Hak-Hak Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 7(2).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dab Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

INTERNET

- Saputra, A. (2017). Tok! 127 Keputusan Sengketa Konsumen Dianulir MA. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-3669668/tok-127-keputusan-sengketa-konsumen-dianulir-ma>